

Hoari PGSD

ISSN 1411-6960

Volume 1, Nomor 2, November 2003

PGSD

Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar

KARYA PENELITIAN

- Lingkungan Belajar yang Konstruktivistik
- Model Pembelajaran Interaktif Akademis Emosional
- Peningkatan Kemampuan Operasi Logis
- Pendekatan Modifikasi Olahraga Yang Humanistik
- Pemberdayaan SD Terpencil dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun

KARYA KAJIAN

- Mencegah Kebohongan dan Kecerdasan Spritual Anak SD
- Kelas Unggulan di Sekolah Dasar

Diterbitkan oleh :

**Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
FKIP Universitas Bengkulu**



PGSD	Vo1	No. 2	Hal. 71 - 139	Bengkulu Mei 2003	ISSN 1411-6960
------	-----	-------	------------------	----------------------	-------------------



Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar

ISSN 1411-6960

PGSD: Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar diterbitkan diterbitkan sejak Mei 2003 oleh Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Universitas Bengkulu.

VISI:

Menjadi sumber utama nasional pengembangan dan penerapan ipteks pendidikan guru sekolah dasar

MISI:

Mendukung staf akademik dan professional di LPTK, PGSD dan SD dalam meningkatkan mutu pendidikan SD

TERBIT:

Dua kali setahun (Mei – November)

Penanggung Jawab:

Rufran Zulkarnain

Ketua Penyunting:

Rambat Nur Sasongko

Sekretaris Penyunting:

Tono Sugihartono

Penyunting Pelaksana:

Didik Suryadi, Nani Yuliantini, Sutrisno,
Sri Ken Kustianti, Riyanto, Herman Lusa, Irwan Koto

Sekretariat:

Syahril, Dewi Putri Kartika, Pin Andriani

Alamat:

PGSD: Jurnal Ilmiah PGSD

Program Studi PGSD FKIP Universitas Bengkulu
Jl. W.R. Supratman Telp. (0736) 21170 Bengkulu 38371A

PGSD: Jurnal Ilmiah PGSD menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Tulisan hendaknya berkenaan dengan permasalahan PGSD dan SD. Teknis dan sistematika penulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Artikel sebagaimana tercantum dalam kulit bagian belakang. Seluruh naskah yang masuk akan dibahas dan disunting kelayakannya.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR REDAKSI	i
DAFTAR ISI	ii

KARYA PENELITIAN

Peningkatan Mutu Proses dan Hasil Belajar Melalui Inovasi Model Pembelajaran Interaktif Akademis Emosional Berbasis Kompetensi Pada Mata Pelajaran IPS di Kelas V SDN 86 Kota Bengkulu Rambat Nur Sasongko	71- 77
Penerapan Penataan Lingkungan Belajar Yang Konstruktivistik Dalam Pembelajaran Strategi Belajar Mengajar Di D-II PGSD UNIB Sri Ken Kustianti.....	78 - 85
Pengembangan Sumber Belajar Melalui Pemanfaatan Lingkungan Sekitar Dalam Pembelajaran IPS Di SD 81 Kota Bengkulu Sri Dadi	86 - 94
Kesulitan-Kesulitan Yang Ditemui Guru Dalam Menyusun Program Pengajaran Di SD Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu Norman Syam	95-101
Peningkatan Efektivitas Pembelajaran Penjaskes di SD 76 Kota - Bengkulu Melalui Pendekatan Modifikasi Olahraga Yang Humanis Tono Sugihartono	102-110
Peningkatan Hasil Belajar Matematika Siswa SD Negeri 21 Kota Bengkulu Melalui Peningkatan Kemampuan Operasi Logis Ansyori Gunawan	111-119
Kajian Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Usaha Pemberdayaan SD Negeri di Daerah Terpencil dan Pedalaman Dalam Rangka Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Prov.Bengkulu Syahril Yusup	120-127

KARYA KAJIAN

Mencegah Kebohongan : Salah Salah Satu Upaya Untuk Membersihkan Jiwa Dalam Rangka Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak Pudji Hartuti	128-133
Program Kelas Unggul di Sekolah Dasar Supami	134-139

KAJIAN TERHADAP EFEKTIFITAS DAN EFESIENSI USAHA PEMBERDAYAAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI DAERAH TERPENCILDAN PEDALAMAN DALAM RANGKA PENUNTASAN WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR 9 TAHUN DI PROVINSI BENGKULU

Oleh
Syahril Yusup¹⁾

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk memerikan efektifitas dan efensiensi pemberdayaan sekolah dasar terpencil yang telah dilakukan selama ini oleh instansi terkait dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif analisis. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik angket, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 1997/1998 ini menunjukkan bahwa pemerintah telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan SD terpencil namun upaya dimaksud belum sepenuhnya efektif dan efisien. Peneliti menyarankan perlunya ada peninjauan ulang terhadap upaya pemberdayaan sekolah dasar terpencil agar menjadi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi, Pemberdayaan, daerah terpencil.

PENDAHULUAN

Hasil-hasil penelitian dan laporan menunjukkan, sekolah dasar di daerah masih sangat tertinggal. Sumber masalah tidak hanya bertumpu pada soal teknik edukatif. Tetapi sumber penghambat pemberian layanan pendidikan di daerah terpencil terletak pada faktor geografis merupakan salah satu penyebab kerumitan dalam pengelolaan pendidikan umumnya dan pengelolaan sekolah dasar khusus-nya (Maswardi, 1995).

Faktor geografis erat pula kaitannya dengan faktor kependudukan. Penduduk yang bermukim di daerah pedalaman dan pulau terpencil jumlahnya sangat sedikit dan jarang. Persoalan ini sangat menyulitkan para *planners* sebagai *decision makers* dalam merancang peta pembangunan sekolah dasar yang berdaya guna, karena tidak mungkin menampung anak-anak usia sekolah di sekitarnya secara memadai.

Kondisi di atas merupakan suatu fakta yang sangat memperhatikan. Sampai sekarang pun "strategi yang tepat" untuk memecahkan masalah tersebut belum diketemukan (Tilaar, 1992; Dedi Supriadi, 1992; Zakaria dan Rambat Nursasongko, 1993; dan Moh. Zein, 1994).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini sengaja diadakan untuk mengkaji secara menyeluruh, mendalam dan secara ilmiah usaha-usaha pemberdayaan sekolah dasar yang selama ini dilakukan oleh instansi terkait. Secara praktis, studi ini akan memberikan masukan yang penting bagi para pengambil keputusan guna memperbaiki kelemahan dalam

¹⁾ Drs. Syahril Yusup, M.Pd. adalah dosen PGSD FKIP Universitas Bengkulu.

pengelolaan sekolah dasar di daerah terpencil. Pada tataran teoritis hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan teori-teori administrasi pendidikan yang sampai sekarang dirasakan masih cenderung menggunakan teori-teori administrasi pendidikan dari negara lain yang tidak selalu sejalan dengan latar Indonesia ketika diterapkan di lapangan.

METODE PENELITIAN

Studi ini bersifat deskriptif kualitatif analitis yang menelaah pengelolaan sekolah dasar di daerah terpencil. Lingkup studi pada latar Provinsi, dalam hal ini Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor : 17 Tahun 1996 masih ada sebanyak 72 SD terpencil yang tersebar di tiga Kabupaten Bengkulu Utara, dan Kabupaten Rejang Lebong. Tidak semua SD terpencil dijadikan sasaran penelitian, tetapi diambil beberapa saja sebagai sampel. Adapun SD terpencil yang menjadi sampel penelitian ini ialah (1) SD Kayu Elang, (2) SD Cugung Langu, (3) SD Malakoni, (4) SD Meok, (5) SD Air Pungur, dan (6) SD Talang Sawah.

Data penelitian dikumpulkan melalui (a) angket/kuesioner, (b) observasi, (c) wawancara dan (d) dokumentasi. Instrumen penelitian dalam bentuk angket dikembangkan oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan. Strategi analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses menyusun data (menggolongkannya dalam tema atau kategori) agar dapat ditafsirkan atau diinterpretasi (Moeleong, 1990:198). Agar dapat menafsirkan dan menginterpretasikan data secara baik dibutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi peneliti sehingga mampu memberikan makna pada setiap fenomena atau data yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan prasarana, sarana dan material pendidikan

Usaha-usaha pemerintah untuk menyediakan tempat belajar yang nyaman bagi anak didik dengan menyediakan prasarana, sarana dan material pendidikan sesuai dengan kebutuhan termasuk sangat intensif. Pemerintah tidak hanya membangun gedung sekolah dengan segenap kelengkapannya tetapi juga membangun rumah kepala sekolah, rumah guru dan rumah penjaga sekolah. Usaha ini ditujukan agar kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah mantap bertugas di SD terpencil untuk memberikan layanan pendidikan kepada anak-anak yang sangat membutuhkan. Pemerintah bertekad sungguhpun daerah terpencil sangat sulit untuk dijangkau dan dimonitor namun penyelenggaraan pendidikan di sana tidak boleh terabaikan.

Namun hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha-usaha tersebut belum efektif dan efisien. Peserta didik di daerah terpencil belum dapat menikmati tempat belajar yang nyaman karena kondisi sekolah yang amat memprihatinkan. Kondisi rata-rata ruangan belajar di SDT rusak parah. Lantai tinggal tanah, sebagian atap sudah tidak ada sehingga kalau matahari terik murid kepanasan dan dikala hujan murid dan guru kehujanan. Dari pada kehujanan maka begitu datang hujan kegiatan PBM ditiadakan. Rata-rata dinding gedung SDT sudah jebol dan berlobang-lobang. Dan yang lebih parah lagi sebagian SDT yang diteliti kantor kepala sekolah tidak bisa dipakai lagi karena rusak berat. Kepala sekolah, guru dan penjaga sekolah belum dapat menikmati tempat kerja dan tempat tinggal yang nyaman karena kondisi bangunannya rata-rata sudah rusak berat. Keadaan sebagian besar gedung sekolah, rumah guru, rumah kepala sekolah dan rumah penjaga sekolah yang mengalami rusak berat sebagai

akibat dari beberapa faktor utama (1) dana yang disediakan untuk rehab gedung oleh pemerintah daerah tingkat II (Dinas Dati II) jauh dari kebutuhan, (2) pemanfaatan dana yang kurang mengarah ke sasaran, dan (3) tidak adanya tim penilaian terhadap kondisi gedung sekolah ke daerah terpencil.

B. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Sekolah

Salah satu aspek manajemen yang paling penting sehubungan dengan upaya pemberdayaan sekolah adalah adanya pengelolaan keuangan yang baik (Fakry Gaffar, 1992; Sergiovanni, 1994, dan Idochi, 1995). Untuk melaksanakan program-programnya sekolah memerlukan dukungan keuangan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sesuai dengan kebutuhan (George Psacharopoulos, 1987; Woodhall, 1988, dan Benson, 1992). Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli, Wiseman, 1980; Idochi, 1990; dan Suprianto (1996) menunjukkan besarnya pengaruh aspek keuangan terhadap kinerja kelembagaan sekolah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan, bahwa pengelolaan keuangan SD terpencil belum efektif dan efisien. Pengelolaannya masih bercirikan sebagai berikut : *pertama*, pembiayaan semua SDI yang diteliti sangat mengandalkan dropping dana dari pemerintah baik itu yang bersumber dari dana Bantuan Operasional dan Perawatan (BOP), SBPP dan dana insentif untuk guru, kepala sekolah dan penjaga sekolah terpencil yang besarnya Rp. 10.000,- untuk satu orang selama 1 bulan. *Kedua*, hampir semua sekolah yang diteliti belum mampu menggali dana dari masyarakat dalam jumlah yang memadai untuk keperluan pelaksanaan program-program kerja sekolah. *Ketiga*, dana yang bersumber dari masyarakat, terutama melalui BP3, tidak dapat diandalkan karena disamping jumlah murid yang kecil (rata tiap sekolah 50-100 murid) juga disebabkan karena kurangnya kemampuan orang tua untuk membayar iuran BP3. *Keempat*, dana BOP dan DORP sering tidak diterima oleh sekolah secara utuh dalam bentuk uang karena sebagian digunakan untuk membeli barang atau buku tertentu yang telah disediakan. *Kelima*, jumlah keseluruhan dana operasional yang dikelola secara langsung sama sekali tidak cukup untuk mempertahankan terselenggaranya PBM, apalagi untuk keperluan perawatan gedung sekolah secara keseluruhan.

C. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Ketenagaan

Ketersedian guru yang cukup baik secara kuantitas maupun kualitas disadari merupakan persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sekolah agar proses belajar mengajar dapat terlaksana, sebagaimana mestinya. Sesuai dengan kurikulum SD yang berlaku sekarang ini, di satu SD dengan enam kelompok belajar paling tidak harus memiliki 8 orang guru; dengan perincian 6 orang guru umum ditambah dengan 1 orang guru olah raga dan 1 orang guru agama. Sosok guru untuk tingkat SD tidak dapat tergantikan dengan teknologi pengajaran apapun. "Teachers are keys to successful schooling" (Sergiovanni, 1987).

Sadar akan kondisi seperti itu maka pelbagai kebijakan telah ditempuh pemerintah agar guru-guru mau dan betah bertugas di SD terpencil. Di antara usaha-usaha tersebut ialah (1) memprioritaskan pengangkatan guru untuk SD terpencil, (2) mengangkat putra-putri setempat sebagai guru SD terpencil, (3) menyediakan perumahan bagi guru dan kepala sekolah, (4) mempermudah urusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji, (5) memberikan insentif bagi guru, (6) memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti program penyetaraan, dan (7) memberikan prioritas pindah ke kota setelah mengabdikan di daerah terpencil selama lima tahun.

Dalam kenyataannya usaha-usaha tersebut belum efektif, akibatnya sekolah dasar daerah terpencil masih saja kekurangan guru. Walaupun dalam daftar nama-nama guru jumlah guru di SD terpencil sudah cukup (minial untuk SD biasa 6 orang, dan SD kecil 3 orang) namun di lapangan sangat sering dijumpai sekolah kekurangan guru. Rata-rata hanya ada dua atau tiga orang saja yang masuk sekolah sedangkan lainnya absen.

D. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Teknis Edukatif

Pengelolaan tenaga teknis edukatif di sekolah dasar terpencil secara normatif, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1965 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, langsung berada di bawah tanggung jawab Departemen Pendidikan. Untuk tingkat propinsi pengelolaannya langsung berada di bawah tanggung jawab Kanwil P dan K dengan segenap jajarannya. Sesuai dengan ketentuan, tanggung jawab Depdikbud adalah (1) pengawasan atas isi dan jalannya pelajaran, (2) pimpinan teknis, (3) hak untuk menetapkan, mengubah dan menambah rencana pelajaran, isi dan tujuan urusan (4) hak untuk menentukan kitab-kitab pelajaran, (5) urusan sekolah kor-kordanas, (6) hak untuk menetapkan liburan.

Pihak Kanwil Depdikbud dengan segenap jajarannya telah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengelolaan teknis edukatif di SD. Di antara usaha-usaha tersebut antara lain ialah (1) mengadakan penataran kepada guru-guru, (2) memfasilitasi guru-guru yang akan sekolah lanjutan, (3) mempercepat proses pengurusan kenaikan pangkat guru, (4) meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pengajaran guru lewat para penilik, (5) mendistribusikan alat-alat pelajaran dan buku pelajaran ke sekolah, (6) memfasilitasi sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru, ujian-ujian baik ujian catur wulan maupun ujian akhir, (7) memberikan bantuan konsultasi kepada Dinas P dan K dalam pembangunan gedung SD agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak, (8) memberikan bantuan konsultatif dalam bentuk rekomendasi kepada Dinas P dan K dalam pengadaan buku dan alat pelajaran yang dilakukan lewat proyek Dinas, (9) memfasilitasi guru dan kepala sekolah melalui penyelenggaraan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), dan (10) mengadakan proses penjarangan dan Pembinaan Kepala Sekolah.

Usaha-usaha tersebut sebagian di antaranya telah memberikan hasil yang baik. Penerimaan siswa baru di SD terpencil telah dapat berjalan lancar sehingga sangat membantu upaya penuntasan wajib belajar pendidikan 9 tahun. Ujian-ujian telah terlaksana dengan sebaik-baiknya baik itu ujian caturwulan maupun ujian akhir. Namun demikian ada beberapa hal substansial yang masih perlu diperbaiki. Masalah kedisiplinan guru, ketersediaan buku pelajaran yang memadai di sekolah, keaktifan penilik sekolah datang ke sekolah untuk memberikan pembinaan, penyelenggaraan KKG dan KKS merupakan sejumlah aspek yang erat kaitannya dengan teknis edukatif yang masih perlu diperbaiki.

E. Efektivitas dan Efisiensi Koordinasi Dinas P dan K Dalam Pengelolaan SD Terpencil.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pengelolaan sekolah dasar, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1990 bahwa pengelolaan sekolah dasar berada di bawah dua departemen, yaitu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Adanya dua instansi yang mengelola SD, termasuk SD terpencil tentunya memerlukan koordinasi yang serapi dan sebaik mungkin. Dengan adanya koordinasi seperti itu maka diharapkan setiap permasalahan dapat diatasi. Apalagi untuk SD di pedalaman dan di daerah terpencil, pengelolaannya menghadapi persoalan yang berasal dari terbatasnya sumber yang tersedia. Untuk itulah dibutuhkan adanya manajemen pendidikan yang baik, yang mampu membuat

proses belajar mengajar berjalan baik. Idealnya, manajemen tersebut hendaknya mampu mewujudkan suatu visi bersama (shared vision) yang dapat mengikat semua pihak yang terlibat dengan kegiatan PBM di sekolah dalam rangka melangkah ke masa depan. Team work, dan konsep visi bersama "shared vision", yang berdampak pada setiap dimensi kehidupan organisasi patut untuk dikembangkan oleh kepala sekolah dasar terpencil (lihat : Makaginan Makginsar, 1990).

Hasil penelitian di lapangan mendukung pernyataan Tilaar (1993) yaitu dalam pengelolaan sekolah dasar terjadi koordinasi yang kurang efektif antara Kanwil DEPDIKBUD dan dengan DINAS P dan K. Padahal sebagaimana dikatakan oleh Maswardi (1995) pada prinsipnya pekerjaan masing-masing pengelola sangat jelas dan kepada siapa mereka bertanggungjawab. Justru keadaan seperti ini yang menarik perhatian. Di satu pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun perencanaan dan melakukan pengawasan sendiri sesuai dengan kewenannya. Di pihak lain, Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan juga juga melakukan hal yang sejenis. Sedangkan lembaga yang ditangani adalah satu lembaga yaitu sekolah dasar. Oleh karena itu, muncul tanda tanya dimana bertemunya perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan pengawasan sekolah dasar ?.

F. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman dalam Pemberdayaan SD terpencil

Disadari bahwa membangun sekolah dasar terpencil yang ideal, yaitu yang mampu menjalankan visi, misi dan tujuannya sebagaimana yang diharapkan tidaklah mudah. Namun demikian bukan berarti kita tidak dapat berbuat apa-apa untuk memperbaiki keadaan. Apalagi bila dilihat dari sisi Total Quality Management (TQM) yang memandang bahwa dalam kondisi apapun organisasi tetap memiliki sejumlah peluang untuk dikembangkan (Suharyadi, 1997). Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah menerapkan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan treats) sebagaimana pendapat Gitlow dan Gitlow (1994: 38) yang dikutip oleh Suidarman (1998:67) bahwa: *"Another method by which top management can creat a crisis is by performing SWOT. SWOT analysis can helpful in determining the internal and external condition and situation that face an organization"*.

Hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan hasil kajian terhadap pelbagai hasil penelitian menunjukan adanya sejumlah kekuatan yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan SD terpencil. Di samping itu, teridentifikasi pula sejumlah peluang yang dapat dioptimalkan. Di sisi lain ada kelemahan dan ancaman yang perlu diwaspadai. SWOT ini melingkupi keseluruhan sistem yang berkaitan dengan pengelolaan SDT.

Dilihat dari sistem pengelolaan, kekuatan yang ada ialah adanya komitmen institusional, pengalaman penyelenggaraan dan dukungan personil. Kelemahan yang ada dari sudut sistem antara Depdikbud dan Dinas P dan K yang kurang. Peluang yang dapat dioptimalakan ialah adanya kemungkinan untuk menstrukturisasi dan mentranspormasi sistem pengelolaan SDT. Sedangkan ancaman pada tataran sistem pengelolaan mencakup pada sikap mental sementara aparat yang belum kondusif yaitu adanya keinginan untuk mempertahankan status quo dan aspek pembiayaan.

G. Pemberdayaan SD Terpencil

Pemberdayaan sekolah dasar terpencil harus dimulai dari pembenahan aspek kepemimpinan dan manajemen sekolah, karena berdasarkan berbagai hasil penelitian terdahulu tentang pendidikan di daerah terpencil, melaporkan bukti-bukti empiris bahwa kedua aspek inilah yang merupakan titik lemah pembangunan pendidikan disana (Zakaria, 1993; Sumarsih, 1994; Moh Zen, 1995; Fakry Gaffar, 1995). Lemahnya aspek manajemen

dan kepemimpinan dalam pengelolaan sekolah bukan merupakan suatu hal yang mengagetkan, karena hasil penelitian di manca negara lebih dari satu dekade terakhir yang dilakukan oleh Purkey and Smith, 1982; Edmons, 1979; Madaus, 1995 *et al.*, 1981; Cohn and Rossmiller, 1987; Diana G. Pounder, 1995, dan Kenneth Leithwood, 1994, menunjukkan hal yang sama. Para peneliti menyarankan perlunya perhatian dan perbaikan dua aspek tersebut secara terus menerus agar sekolah yang tertinggal tidak semakin terpuruk.

Pemberdayaan sekolah dimulai dengan jalan membenahi aspek manajemen dan kepemimpinan, karena dua aspek inilah sesungguhnya yang sering dijadikan kriteria untuk membedakan antara sekolah yang efektif dengan yang tidak efektif (Sargiovanni, 1994, dan Peter Lonely, 1995 dan Phillip Hallinger, 1996). Fullan (1995), menyatakan : *It is a widely accepted that educational change requires leadership and management*. Ogawa dan Bossert (1995), menyatakan : *leadership and management as an organizational quality. They note that the assumed function of leadership and management affect of the school performance*. Riset terhadap implementasi inovasi di sekolah sejak tahun 1970 telah mengidentifikasi peran-peran penting yang dilakukan oleh kepemimpinan dan manajemen sekolah dalam usaha memajukan sekolah *-in school-improvement effort* (Berman & McMaughlin, 1978; Fulan, 1982; Hall, Ritherford, & Griffin, 1982). Riset serupa tentang sekolah yang efektif menyimpulkan: *"Strong leadership and management was among those factors within the school that make a difference in student learning"*, (Brookover & Lazotte, 1977; Edmonds, 1979; Rutter, Maugham, Mortimore,ouston & Smith, 1997).

SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan

1. Pemerintah dengan instansi terkait telah menunjukan usaha-usaha yang serius untuk memberdayakan SD Terpencil. Di antara uasaha-usaha dimaksud adalah (1) mengadakan penataran kepada guru-guru, (2) memfasilitasi guru-guru yang akan sekolah lanjut, (3) mempercepat proses pengurusan kenaikan pangkat guru, (4) Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pengajaran guru lewat para penilik, (5) mendistribusikan alat-alat pelajaran dan buku-buku pelajaran ke sekolah, (6) memfasilitasi sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru, ujian-ujian baik ujian caturwulan maupun ujian akhir, (7) memberikan bantuan konsultasi kepada Dinas P dan K dalam pembangunan gedung SD agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak, (8) memberikan bantuan konsultatif dalam bentuk rekomendasi kepada Dinas P dan K dalam pengadaan buku dan alat pengajaran yang dilakukan lewat Proyek Dinas, (9) Memfasilitasi guru dan kepala sekolah dengan penyelenggaraan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKS) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), (10) mengadakan proses penjaringan dan pembinaan Kepala Sekolah, (11) memberikan insentif bagi guru SD terpencil, (12) memberikan angka kredit tambahan, (13) membuat kebijakan pengangkatan guru secara khusus, (14) memberikan kesempatan kepada guru dan kepala sekolah untuk mengadakan studi banding, (15) membangun rumah guru, kepala sekolah dan penjaga, dan lain sebagainya.
2. Usaha-usaha pemberdayaan tersebut telah memberikan hasil yang cukup baik. Sebagian besar anak usia sekolah di daerah terpencil telah dapat mengenyam pendidikan di tingkat SD, namun upaya-upaya tersebut belum sepenuhnya efektif.

3. Untuk mengefektifkan upaya pemberdayaan SD terpencil pada masa mendatang maka dipandang perlu untuk memberdayakan aspek manajemen dengan terlebih dahulu mengadakan peninjauan kembali terhadap upaya selama ini agar dapat diketahui kekurangan dan kelebihan sehingga dapat dihasilkan manajemen strategis untuk pemberdayaan SD terpencil.
4. Salah satu strategismanajemen yang dipandang tepat untuk memberdayakan SD terpencil ialah model manajemen sekolah mandiri. Dalam manajemen seperti ini sekolah dasar terpencil tidak mengandalkan dropping dana dan fasilitas dari pusat tetapi mampu menggali sendiri kebutuhannya dengan bersandar pada masyarakat.

b. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diruaikan di atas maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Usaha-usaha pemberdayaan sekolah dasar terpencil yang dipraktekan selama ini perlu disempurnakan sehingga menjadi lebih efektif.
2. Sistem pengelolaan SD yang sampai sekarang ini masih di bawah dua atap perlu ditinjau kembali agar memudahkan proses pembinaan dan pemberdayaan. Hal yang perlu dilakukan adalah mengupayakan agar sistem pengelolaan SD ditangani oleh satu lembaga.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada (1) Direktur Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Pada masyarakat Ditjen Dikti yang telah mendanai penelitian ini tahun anggaran 1997/1998, (2) pimpinan Fakultas dan Kelembagaan Penelitian di UNIB yang telah memberikan dukungan akademis dan administratif sehingga terlaksananya penelitian ini, dan (3) masyarakat, pimpinan desa, pimpinan keagamaan dan tokoh adat di lokasi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Benson (1992). Educational Financing. New York : Pergamon Press.
- Bogdan, R., & Biklen (1982). Qualitative Research for Education: An introduction to Theory and Methods. Boston : Allyn and Bacon.
- Depdikbud (1995). Profile Pendidikan di daerah terpencil dan Tertinggal. Laporan Penelitian tim peneliti Sekolah di Daerah Terpencil dan Tertinggal.
- Fakry Gaffar (1990). Manajemen Nasional Pendidikan Indonesia. Makalah yang disajikan pada Seminar Manajemen Nasional Pendidikan IKIP Bandung 1990.
- Gary W. Matkin (1985). Effective Budgeting in Education. Sanfrancisco: Jossey-Bass Publishers.
- George Psacharopoulos (1987). Economic of Education: Research and studies. Ney York: Pergamon Press.
- Kasmiran Wiryo (1978). Studi Tentang pengelolaan Pendidikan dasar di jawa timur. Disertasi S3. Malang: IKIP Malang.
- Mattew B. Miles (1992). Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Ui-Press.
- Moeloeng (1990). Pengantar Penelitian Kualitatif. Jakarta: P2LPTK.
- Nasution (1991). Metode Penelitian naturalistik. Bandung: Tarsito.

- Sergiovanni Thomas, J. (1994). Landscapes, Mindscape and Relactive Practice in Supervision. *Educational Administration Quarterly*, Vo. 12 No. 2, 131-132.
- Sergiovanni (1997). *The Principalship: A Reflective Practise Perspective*. Boston: Allyn and bacon, Inc.
- Sumarsih (1992). Pendidikan dalam Latar Budaya Suku Bangsa Enggano. Laporan Penelitian. Bengkulu: Lembaga Penelitian UNIB.
- Suprianto (1996). Pengelolaan Dana Masyarakat Pada Universitas Brawijaya dan IKIP Malang. Bandung: Tesis S2.
- Tilaar (1992). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung : Rosda Karya.
- Wiseman (1980). *Public finance in Education*. New York : Pergamon Press.